

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, k. (2009). *Diversi sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM PERS.
- Arrasjid, C. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan, Bugin. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group
- Dirdjosisworo, s. (1990). *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Adity Bakti.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*
- Lammintang, p. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lartodiharjo. (2007). *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Lexy J, Moleong. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Martono, L. &. (2006). *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bersis Sekolah*. Jakarta : PT. Balai Pustaka.
- Mulyadi, (2018). *Studi kebijakan public dan pelayanan publik* (Hendrikus, ed.). Bandung: alfabeta.
- Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. PT. Elek Media Komputindo. Jakarta
- Rani.T.B, dkk. (2020). *Buku Ajar Kebijakan Kesehatan: Implementasi Kebijakan Kesehatan*. Semarang: UNDIP PRESS
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsu Bahri, dkk. (2020). *Model Implementasi Program Lembaga Penjamin Mutu, Jawa Barat*: Widina Bhakti Persada Bandung
- Tachjan, d. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Aipi.
- Winarno, b. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Wresniworo, dkk. (2010). *Selamatkan Anak Bangsa Dari Bahaya Narkoba, Cetakan Pertama*, Jakarta: Mitra Bitibmas

Sumber Website

<http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/400/158>

<https://www.sehatq.com/artikel/tahapan-rehabilitasi-narkoba-jefri-nichol10>
Pengertian Narkoba

<http://www.masterpendidikan.com/2017/01/10-pengertian-narkoba-menurut-paraahli.html>

<https://rsjmenur.jatimprov.go.id/post/2020-07-29/pengetahuan-tentang-napza>

<https://indonesiabaik.id/infografis/penggolongan-narkoba>

<https://www.tanjungpinangkota.go.id/berita/syahrul-perangi-narkobauntuk-generasi-anak>

<https://media.neliti.com/media/publications/96545-ID-implementasi-kebijakan-rehabilitasi-peng.pdf>

<https://bnn.go.id/berita-satker/rehab/>

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1766/1381> ★

<https://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/upt-tr-lido/persyaratan-dan-syarat-syarat>

Jurnal

Djaba Misbahudin (2019). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo.

Fitri Selvia. (2020). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

Haerana. (2016). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Kota Makassar.

Hanifa Warih Tio. (2020). Implementasi Rehabilitasi Sosial Basis Biopsikososial Spritual bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di BNN Jakarta Timur.

M. E. Purwani, S. P., Yusa Darmadi, A. A. N., & Walesa Putra, I. M. (2016). Implementasi Pengaturan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika oleh

Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar. *Kertha Patrika*,38(1).
Doi:10.24843/ KP.2016.v38.i01.p05

Novitasari Erika. (2018). Implementasi Program Pencegahan Dan Pemberatasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung Sebagai Bentuk Edukasi Formal Dalam Mengurai Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar.

Rudy Purwanto Feby (2019). Implementasi Rehabilitasi terhadap Penyalagunaan Narkotika Studi di Rumah Sakit Jiwa dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dokumen

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberatasan penyalahgunaan dan pegedaran gelap narkoba (P4GN).

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang standar pelayanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba

UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika dan peraturan No. 25 Tahun 2011, tentang jaminan layanan rehabilitasi tanpa pidana.

